

TINJAUAN UMUM

TANGGUH DAN MANDIRI: SINERGI MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI LEBIH TINGGI DAN BERDAYA TAHAN

Perekonomian Indonesia pada 2025 tetap berkinerja baik dan berdaya tahan di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian global. Stabilitas tetap terjaga dengan inflasi yang tetap berada dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ serta nilai tukar Rupiah yang terkendali didukung komitmen kuat Bank Indonesia. Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan digitalisasi sistem pembayaran meningkat pesat, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional yang kuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia merupakan kunci dari ketahanan perekonomian nasional terhadap gejolak eksternal. Ke depan, sinergi bauran kebijakan perlu makin dipererat guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan menuju Indonesia Emas 2045.





Ekonomi Indonesia tetap berkinerja baik dan berdaya tahan di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi pada 2025 tetap baik didukung stabilitas yang terjaga dengan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. Ketahanan eksternal tetap solid, tecermin dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang sehat ditopang oleh surplus neraca perdagangan yang besar. Penyaluran kredit/pembiayaan perbankan tetap baik meskipun perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ditopang oleh stabilitas sistem keuangan yang tetap terjaga. Selain itu, kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital juga tetap kuat, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal, serta infrastruktur yang berdaya tahan dan struktur industri yang membaik.

Sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional yang kuat menjadi kunci penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2025 terus diperkuat dan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas, bersinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan moneter diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas (*"pro-growth and stability"*) di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran turut diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (*"pro-growth"*). Ketiga bauran kebijakan utama Bank Indonesia tersebut didukung oleh penguatan kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA), pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan ekonomi-keuangan syariah (eksyar), serta kebijakan internasional. Sementara itu, kebijakan fiskal APBN yang ditempuh dengan sehat dan kredibel menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk *counter cyclical* dalam rangka memelihara momentum pertumbuhan untuk stabilisasi perekonomian (fungsi stabilisasi), untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 (fungsi alokasi), serta mampu menghantar terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang

Sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional yang kuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia perlu makin dipererat guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan menuju Indonesia Emas 2045

berkeadilan (fungsi distribusi). Sejalan dengan hal tersebut, upaya penyehatan APBN ditempuh melalui *collecting more, spending better*, dan *innovative financing*. Kedua kebijakan ini didukung kebijakan struktural untuk meningkatkan kapasitas perekonomian sehingga dapat tumbuh lebih tinggi.

Ke depan, sinergi bauran kebijakan nasional antara Pemerintah dan Bank Indonesia terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Penguatan sinergi dibutuhkan untuk memitigasi risiko perekonomian global dan domestik sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sinergi bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional diarahkan pada lima aspek penting, yaitu (i) memperkuat stabilitas dan meningkatkan permintaan; (ii) mendorong hilirisasi, industrialisasi, dan ekonomi kerakyatan; (iii) meningkatkan pembiayaan dan pendalaman pasar keuangan; (iv) mengakselerasi ekonomi-keuangan digital nasional; dan (v) memperkuat kerja sama investasi dan perdagangan internasional (Gambar 1.).

Sejalan dengan pentingnya sinergi kebijakan tersebut, bauran kebijakan Bank Indonesia akan terus diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas. Kebijakan moneter akan diarahkan pada pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah, dengan tetap memanfaatkan terbukanya ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (*"pro-stability and growth"*) yang masih berada di bawah kapasitas potensialnya. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan



Gambar 1. Tantangan dan Sinergi untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan



sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (*“pro-growth”*). Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dimaksud didukung oleh kebijakan akselerasi pendalaman PUVA, kebijakan pengembangan ekonomi-keuangan inklusif, termasuk UMKM dan ekonomi-keuangan syariah. Ke depan, Bank Indonesia akan senantiasa mengkalibrasi bauran kebijakan Bank Indonesia sesuai dengan dinamika perekonomian global dan nasional.

Bank Indonesia memprakirakan kinerja perekonomian Indonesia pada 2025 yang positif akan terus berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Penguatan sinergi bauran kebijakan transformasi nasional melalui lima aspek utama sebagaimana diuraikan di atas menjadi kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan berada pada kisaran 4,7-5,5%. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat menjadi 4,9-5,7% pada 2026 dan 5,1-5,9% pada 2027. Dengan dukungan bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional tersebut, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2031 yang mencapai 5,6-6,4% untuk skenario *“Baseline”* diperkirakan dapat meningkat

menjadi 6,1-6,9% pada skenario *“Optimis”* dan bahkan lebih tinggi lagi menjadi 6,9-7,7% pada skenario *“Super Optimis”*. Stabilitas harga tetap terjaga dengan inflasi tetap terkendali pada kisaran $2,5 \pm 1\%$, sementara stabilitas nilai tukar Rupiah akan tetap terjaga didukung transaksi berjalan yang diperkirakan tetap rendah pada kisaran defisit 0,4% hingga surplus 0,4% dari PDB pada 2031. Kredit/pembiayaan dari perbankan diproyeksikan tumbuh optimal sekitar 12-16% per tahun. Di sisi fiskal, defisit anggaran diperkirakan tetap terjaga di bawah 3% dari PDB, yang mencerminkan konsistensi dan kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia.

Kinerja dan Prospek Ekonomi Global: Pertumbuhan Melambat, Ketidakpastian Tinggi

Ketidakpastian global pada 2025 tetap tinggi dipengaruhi oleh meningkatnya intensitas perang dagang dan berlanjutnya ketegangan geopolitik. Pengenaan tarif sepihak oleh Amerika Serikat (AS) memicu tindakan balasan dari sejumlah negara besar, sehingga eskalasi perang dagang antarnegara semakin menguat. Sementara itu, ketegangan geopolitik terus berlanjut, antara lain dipengaruhi oleh perang Rusia-Ukraina yang belum selesai dan ketegangan geopolitik di Timur



Tengah yang semakin memanas seiring dengan peningkatan serangan Israel ke Palestina. Kondisi ini turut mendorong ketidakpastian pasar keuangan meningkat tinggi, sehingga berdampak negatif pada keyakinan para pelaku ekonomi dan investor di berbagai negara.

Kebijakan tarif AS dan berlanjutnya ketegangan geopolitik berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global dengan fragmentasi antarnegara yang semakin melebar. Kebijakan tarif menurunkan volume dan nilai perdagangan global serta semakin memperparah dampak gangguan rantai pasok dunia. Dampak terhadap aktivitas ekonomi lebih terlihat pada memburuknya sentimen konsumen dan produsen akibat ketidakpastian pendapatan dan keberlangsungan usaha. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan dalam tren melambat menjadi 3,3% pada 2025 serta 3,2% pada 2026 dan 2027. Divergensi pola pertumbuhan antarnegara berlanjut dengan ekonomi negara maju dan *emerging economies* tumbuh melambat namun dengan kecepatan yang berbeda. Akibatnya, penurunan inflasi dunia berjalan lebih lambat dari perkiraan sebelumnya.

Secara umum, arah kebijakan moneter global sepanjang 2025 tetap bersifat akomodatif. Ketidakpastian global yang tinggi mendorong bank-bank sentral cenderung lebih berhati-hati dalam menentukan kecepatan dan waktu penurunan suku bunga kebijakannya. Bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), yang mulai menurunkan Fed Fund Rate (FFR) menjadi 4,50% pada September 2024, lebih memilih untuk menunda penurunan berikutnya hingga September 2025 menjadi 4,25%, lalu pada Oktober 2025 menjadi 4,00% dan terakhir pada Desember 2025 menjadi 3,75%. Perbedaan tingkat dan waktu penurunan suku bunga kebijakan juga terjadi di *emerging economies* seperti Tiongkok, India, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, dan juga Indonesia.

Ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi berdampak pada pergeseran aliran modal keluar dari *Emerging Market Economies (EMEs)*. Kebijakan tarif AS dan berlanjutnya ketegangan geopolitik dunia meningkatkan premi risiko

di pasar keuangan global, sehingga mendorong investor melakukan realokasi portofolio ke aset-aset investasi yang dianggap aman (*safe haven assets*), khususnya obligasi AS dan komoditas emas. Di pasar valuta asing, indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara utama dunia (DXY) cenderung tetap tinggi, disertai dengan volatilitas yang tetap tinggi. Hal ini mencerminkan perbedaan imbal hasil antarnegara tetap tinggi di tengah kebijakan moneter bank-bank sentral yang secara umum tetap akomodatif.

Ke depan, perekonomian dunia diperkirakan masih akan diwarnai oleh berlanjutnya ketidakpastian. Setidaknya terdapat lima kecenderungan perkembangan global yang perlu diwaspadai. *Pertama*, berlanjutnya perang dan polarisasi perdagangan dan investasi antarnegara dalam mengatasi ketidakseimbangan perdagangan global. *Kedua*, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan melambat dengan fragmentasi antarnegara yang melebar. *Ketiga*, membengkak tingginya utang publik dunia dengan beban yang semakin berat, baik di negara maju maupun *emerging economies*. *Keempat*, pasar keuangan global memendam kerentanan dan risiko yang tinggi, khususnya dari lembaga keuangan nonbank. *Kelima*, kerentanan dan risiko pasar keuangan global semakin tinggi sejalan dengan maraknya penerbitan dan perdagangan mata uang dan aset digital oleh pihak swasta. Dinamika, prospek dan risiko perekonomian global yang penuh gejolak dan tantangan tersebut berimplikasi besar pada perekonomian negara-negara EMEs, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kondisi tersebut perlu direspons dengan perumusan dan implementasi bauran kebijakan ekonomi nasional yang optimal.

Kinerja dan Prospek Ekonomi Nasional: Stabilitas Tetap Terjaga, Pertumbuhan Meningkat

Ekonomi Indonesia 2025 tetap berkinerja baik dan berdaya tahan di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II dan III 2025 lebih baik dari prakiraan. Kinerja ekspor nonmigas meningkat dipengaruhi *front-loading* ekspor ke AS sebagai respons antisipasi eksportir terhadap kebijakan tarif AS, di samping kenaikan ekspor



produk pertanian dan manufaktur. Kenaikan pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh permintaan domestik, khususnya investasi swasta dan realisasi sejumlah program prioritas Pemerintah, termasuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di berbagai daerah. Konsumsi rumah tangga juga tumbuh baik seiring dengan tingginya mobilitas masyarakat, meskipun perlu terus diperkuat di tengah menurunnya ekspektasi konsumen khususnya pada kelompok menengah ke bawah, serta terbatasnya ketersediaan lapangan kerja. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan berada pada kisaran 4,7-5,5% dan akan meningkat lebih tinggi pada 2026 dan 2027 masing-masing dalam kisaran 4,9-5,7% dan 5,1-5,9%. Sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional antara Pemerintah dan Bank Indonesia perlu terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi

baik dari sisi permintaan (*demand*) maupun penawaran (*supply*) dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian.

Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah gejolak global dengan NPI yang terjaga sehat. Untuk keseluruhan tahun 2025, transaksi berjalan diperkirakan mengalami defisit yang lebih rendah dari tahun sebelumnya, yakni berada pada kisaran defisit 0,5% sampai dengan surplus 0,3% dari PDB. Sementara itu, tingginya gejolak global berdampak negatif pada kinerja transaksi modal dan finansial dengan terjadinya neto arus keluar (*net outflows*) investasi portofolio, di tengah tetap positifnya penanaman modal langsung dimana hingga akhir 2025, investasi portofolio tercatat *net outflows* sebesar 6,8 miliar dolar AS. Pada akhir Desember 2025, posisi cadangan devisa tetap kuat sebesar 156,5 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa pada

Tabel 1. Kinerja dan Prospek Ekonomi Nasional

Komponen	2021	2022	2023	2024	2025			
					I	II	III	IV
Pertumbuhan Ekonomi (Persen, yoy)	3,70	5,31	5,05	5,03	4,87	5,12	5,04	
Konsumsi Rumah Tangga (Persen, yoy)	2,01	4,94	4,82	4,94	4,95	4,97	4,89	
Konsumsi Pemerintah (Persen, yoy)	4,25	-4,42	3,02	6,61	-1,37	-0,33	5,49	
PMTB (Persen, yoy)	3,80	3,87	3,76	4,61	2,12	6,99	5,04	
PMTB Bangunan (Persen, yoy)	2,32	0,91	4,04	5,51	1,35	4,89	3,02	
PMTB Nonbangunan (Persen, yoy)	8,42	12,53	3,03	2,23	4,32	12,93	10,34	
Ekspor Barang dan Jasa (Persen, yoy)	17,99	16,23	1,34	6,51	6,44	10,95	9,91	
Impor Barang dan Jasa (Persen, yoy)	24,86	15,00	-1,60	7,95	4,00	11,48	1,18	
Inflasi IHK (Persen, yoy)	1,87	5,51	2,61	1,57	1,03	1,87	2,65	2,92
Inflasi Inti (Persen, yoy)	1,56	3,36	1,80	2,26	2,48	2,37	2,19	2,38
Inflasi <i>Volatile Food</i> (Persen, yoy)	3,20	5,61	6,73	0,12	0,37	0,57	6,44	6,21
Inflasi <i>Administered Prices</i> (Persen, yoy)	1,79	13,34	1,72	0,56	-3,16	1,34	1,10	1,93
Neraca Pembayaran Indonesia								
Defisit Transaksi Berjalan (Persen PDB)	0,30	1,00	-0,15	-0,62	-0,05	-0,76	1,09	
Transaksi Modal dan Finansial (miliar Dolar AS)	12,57	-8,68	9,87	17,91	-0,39	-3,52	-8,07	
<i>Overall Balance</i> (miliar Dolar AS)	13,46	4,00	6,30	7,21	-0,79	-6,74	-6,38	
Cadangan Devisa (miliar Dolar AS)	144,91	137,23	146,38	155,72	157,09	152,57	148,74	156,47
Nilai Tukar (rata-rata; Rp per Dolar AS)	14.296	14.873	15.247	15.841	16.352	16.514	16.364	16.667
IHSG (rata-rata; Indeks)	6.222,27	6.964,56	6.853,65	7.299,58	6.767,74	6.853,86	7.621,56	8.385,36
Yield SUN 10 Tahun (rata-rata; Persen)	6,34	7,02	6,62	6,84	7,00	6,90	6,54	6,20
Perbankan								
Kredit Total (Persen, yoy)	5,24	11,35	10,38	10,39	9,16	7,77	7,70	9,69
CAR (akhir periode, persen)	25,67	25,63	27,66	26,65	25,38	25,81	26,15	26,05*
NPL (akhir periode, persen)	3,00	2,44	2,19	2,08	2,17	2,22	2,24	2,05
APBN**								
Penerimaan Perpajakan (triliun Rupiah)	1.547,8	2.034,6	2.154,2	2.231,8				2.217,9
Keseimbangan Primer (triliun Rupiah)	-431,6	-74,1	102,6	-20,7				-180,7
Defisit APBN (Persen PDB)	-4,57	-2,35	-1,61	-2,30				-2,92

Sumber: BPS, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan BEI
Keterangan: *Posisi November 2025, **Keseluruhan tahun 2025, realisasi sementara



akhir Desember 2025 setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, jauh melebihi standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor (Tabel 1.).

Ketahanan eksternal perekonomian Indonesia juga tecermin dari terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak memburuknya kondisi global. Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah sempat meningkat akibat kebijakan tarif sepihak oleh AS dan dinamika global lainnya, namun langkah stabilisasi Bank Indonesia berhasil menahan pelemahan lebih dalam. Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah kembali tinggi sejak akhir Agustus 2025 akibat faktor global, seperti penurunan FFR yang dinilai kurang akomodatif (*less dovish*) dan *government shutdown* di AS, serta faktor domestik antara lain berupa kerusakan sosial dan kekhawatiran pasar atas melebarnya defisit fiskal. Nilai tukar Rupiah hingga akhir Desember 2025 tercatat Rp16.675 per dolar AS, atau melemah 3,48% dari posisi akhir Desember 2024. Secara keseluruhan, pergerakan Rupiah relatif stabil dibandingkan dengan kelompok mata uang negara berkembang dan lebih kuat dibandingkan dengan mata uang negara maju selain dolar AS. Stabilisasi nilai tukar Rupiah tidak hanya ditopang oleh konsistensi kebijakan stabilisasi Bank Indonesia, tetapi juga oleh peningkatan konversi valuta asing ke Rupiah oleh eksportir seiring dengan penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Stabilitas harga terjaga dengan inflasi yang rendah dalam kisaran sasaran $2,5\pm 1\%$ dan mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Desember 2025 tercatat rendah sebesar 2,92% (yoy). Inflasi inti terjaga rendah sebesar 2,38% (yoy), seiring konsistensi kebijakan suku bunga dalam menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang masih besar, *imported inflation* yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif dari digitalisasi. Inflasi *volatile food* (VF) tercatat 6,21% (yoy). Sementara itu, inflasi kelompok *administered prices* (AP) tercatat sebesar 1,93% (yoy), sejalan

dengan terbatasnya kebijakan penyesuaian harga yang diatur oleh Pemerintah. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK pada 2026 dan 2027 akan tetap terjaga rendah dalam sasaran $2,5\pm 1\%$ didukung oleh komitmen Bank Indonesia untuk terus konsisten memperkuat kebijakan moneter serta sinergi dengan Pemerintah dalam pengendalian inflasi baik di pusat maupun di daerah.

Stabilitas moneter dan pasar keuangan tetap terjaga seiring dengan penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia. Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia menurunkan BI-Rate sebanyak lima kali dengan total penurunan sebesar 125 bps menjadi 4,75% pada Desember 2025, level terendah sejak 2022. Penurunan BI-Rate dan ekspansi likuiditas moneter Bank Indonesia mendorong penurunan suku bunga pasar uang, Indonesia *Overnight Index Average* (INDONIA), dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN). Namun demikian, transmisi ke suku bunga perbankan berjalan lambat dengan penurunan suku bunga deposito 1 bulan sebesar 56 bps dan suku bunga kredit sebesar 39 bps hingga Desember 2025. Kebijakan penurunan BI-Rate didukung juga oleh ekspansi likuiditas Bank Indonesia untuk mendukung efektivitas transmisi penurunan suku bunga, meningkatkan likuiditas, dan mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas. Langkah ini dilakukan melalui penurunan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp186,07 triliun, serta pembelian SBN, termasuk pembelian di pasar sekunder dan *debt switching* yang mencapai Rp332,14 triliun. Ekspansi likuiditas juga dilakukan melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang sampai dengan akhir Desember 2025 telah menambah likuiditas perbankan sebesar Rp388,06 triliun. Pendalaman pasar uang terus juga diperkuat melalui implementasi *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2030 dan peran Dealer Utama, yang mendorong peningkatan transaksi dengan signifikan.

Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga didukung kecukupan modal perbankan yang kuat dan risiko kredit bermasalah yang rendah. Rasio kecukupan modal *Capital Adequacy Ratio*



perbankan pada November 2025 tercatat sebesar 26,05% dan tergolong kuat dalam menyerap risiko. Sementara itu, rasio kredit bermasalah *Non-Performing Loan* perbankan pada November 2025 tetap terjaga rendah. Risiko kredit yang terjaga juga tecermin pada rasio *Loan at Risk* (LAR) yang terus menurun. Namun demikian, penyaluran kredit/pembiayaan perbankan masih perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kredit tercatat 9,69% (yoy) pada Desember 2025, dengan kredit investasi tumbuh tinggi 21,06% (yoy), sementara kredit modal kerja dan kredit konsumsi masih berada dalam tren melambat masing-masing sebesar 4,52% dan 6,58%(yoy). Penyaluran kredit/pembiayaan yang lambat dipengaruhi oleh sikap kehati-hatian perbankan dan permintaan yang belum kuat. Ke depan, stabilitas sistem keuangan diperkirakan akan tetap terjaga dengan semakin meningkatnya kinerja perekonomian nasional. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Transaksi Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) pada triwulan IV 2025 meningkat 31,04% (yoy) sehingga mencapai Rp65.069,78 triliun. Dari sisi ritel, volume transaksi BI-FAST tumbuh 30,44% (yoy) mencapai 1.358,65 juta transaksi. Transaksi *digital payment* tercatat 14,26 miliar transaksi atau tumbuh sebesar 39,21% (yoy). Transaksi QRIS terus tumbuh pesat sebesar 139,99% (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 59,53 juta dan *merchant* 42,75 juta. Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, uang kartal yang diedarkan (UYD) tumbuh 12,90% (yoy) menjadi Rp1.359,94 triliun sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi. Stabilitas sistem pembayaran juga tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang berdaya tahan dan struktur industri yang membaik. Dari sisi infrastruktur, kelancaran dan keandalan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) tetap terjaga dengan baik. Dari sisi struktur industri, interkoneksi sistem pembayaran dan perluasan ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) terus meningkat. Transaksi pembayaran

berbasis Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) juga meningkat sejalan adopsi SNAP yang meluas. Sejalan dengan perkembangan nontunai, Bank Indonesia terus berkomitmen menjaga ketersediaan uang Rupiah kartal dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, serta dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk menjangkau daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) sebagai wujud nyata komitmen Bank Indonesia dalam menjaga kedaulatan NKRI serta mendukung kelancaran sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

Bauran Kebijakan Bank Indonesia 2025: Mendorong Pertumbuhan, Menjaga Stabilitas

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2025 terus diperkuat dan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas, bersinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional. Di bidang kebijakan moneter, sejalan dengan inflasi yang rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran, Bank Indonesia menurunkan suku bunga dan melakukan ekspansi operasi moneter untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas nilai Rupiah. Di bidang kebijakan makroprudensial, insentif likuiditas diberikan kepada perbankan guna mendorong kredit/pembiayaan ke sektor-sektor prioritas dalam program Asta Cita Pemerintah. Sementara itu, di bidang sistem pembayaran, digitalisasi sistem pembayaran terus diakselerasi untuk meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan digital, khususnya pada sektor riil dan UMKM. Ketiga bauran kebijakan utama Bank Indonesia ini didukung penguatan kebijakan untuk pendalaman PUVA, pengembangan UMKM dan ekonomi-keuangan syariah, serta kebijakan internasional.

Kebijakan moneter Bank Indonesia ditempuh melalui penurunan suku bunga BI-Rate, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan ekspansi likuiditas moneter. Langkah ini ditempuh untuk optimalisasi trilema kebijakan moneter, yakni menjaga stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, dan kecukupan devisa. Kebijakan stabilitas harga dilakukan melalui penurunan BI-Rate sebanyak



lima kali sebesar 125 bps sepanjang 2025 menjadi 4,75% pada Desember 2025. Kebijakan suku bunga ditetapkan secara *forward-looking* dan *pre-emptive* untuk mengarahkan prakiraan inflasi ke depan agar tetap terkendali dalam kisaran $2,5 \pm 1\%$. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengendalian inflasi. Sementara itu, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah terus diperkuat dengan intervensi di pasar *off-shore* melalui *Non-Deliverable Forward* (NDF) dan intervensi di pasar domestik melalui pasar *spot*, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), serta pembelian SBN di pasar sekunder. Kebijakan tersebut diperkuat dengan ekspansi likuiditas melalui strategi operasi moneter *pro-market* guna memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, meningkatkan likuiditas, dan mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas. Strategi ini ditempuh antara lain melalui penurunan posisi instrumen moneter SRBI serta pembelian SBN termasuk pembelian di pasar sekunder dan program *debt switching*. Ketiga instrumen moneter tersebut, yaitu kebijakan suku bunga BI-Rate, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan ekspansi likuiditas moneter didukung oleh kecukupan cadangan devisa. Bank Indonesia senantiasa memastikan kecukupan cadangan devisa sesuai standar internasional untuk mendukung pembayaran utang luar negeri Pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah.

Kebijakan makroprudensial ditempuh dengan meningkatkan insentif likuiditas dan melonggarkan seluruh instrumen makroprudensial guna mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial semakin diperkuat untuk mencapai kredit yang optimal, stabilitas sistem keuangan (SSK), dan inklusi keuangan. Besaran insentif KLM dinaikkan untuk mendorong peningkatan penyaluran kredit perbankan ke sektor-sektor prioritas Pemerintah dalam Asta Cita. Instrumen Rasio Pinjaman Luar Negeri (RPLN) dilonggarkan untuk memperluas alternatif pendanaan bank dari luar negeri. Selain itu,

Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) juga dilonggarkan untuk memberikan tambahan ruang likuiditas melalui pengurangan rasio kewajiban surat berharga yang wajib dimiliki terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Instrumen kebijakan makroprudensial lainnya tetap dipertahankan longgar untuk mendorong penyaluran kredit. Surveilans makroprudensial dan pasar uang terhadap sistem perbankan juga diperkuat untuk turut menjaga SSK dengan koordinasi erat dalam KSSK.

Bank Indonesia terus mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan kecukupan pagedaran uang Rupiah untuk mendukung kelancaran, efisiensi, dan produktivitas transaksi ekonomi dan keuangan. Transformasi digital sistem pembayaran dilakukan secara konsisten sesuai dengan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Akselerasi digitalisasi ditempuh dengan inovasi instrumen dan perluasan layanan pembayaran digital, penguatan struktur industri dan stabilitas infrastruktur sistem pembayaran, serta integrasi ekosistem ekonomi-keuangan digital nasional. Pada tahun 2025, Bank Indonesia terus memperluas akseptasi pembayaran digital melalui kebijakan skema harga QRIS yang lebih murah untuk *merchant* Badan Layanan Umum (BLU) dan *Public Service Obligation* (PSO). Dari sisi inovasi, fitur QRIS telah diperluas melalui peluncuran QRIS TAP (tanpa pindai) berbasis teknologi *Near Field Communication* (NFC). Sementara itu, penguatan struktur industri sistem pembayaran ditempuh melalui perluasan implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP). Penguatan kelembagaan industri sistem pembayaran dilakukan melalui penguatan fungsi surveilans dan manajemen risiko, termasuk terhadap transaksi ilegal dan ancaman siber. Stabilitas infrastruktur sistem pembayaran terus dijaga melalui optimalisasi pemanfaatan fitur BI-FAST Fase I Tahap 2 yang mencakup layanan transfer secara kolektif, pembayaran atas dasar permintaan, dan transfer debit secara langsung. Elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah juga diperkuat melalui program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) serta peningkatan akseptasi Kartu



Kredit Indonesia (KKI). Di sisi eksternal, sinergi internasional diperluas melalui implementasi *Regional Payment Connectivity* (RPC) di kawasan ASEAN dan pembukaan koridor kerja sama QRIS Antarnegara dengan negara mitra baru yaitu Indonesia-Jepang. Di sisi pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia senantiasa memastikan kecukupan dan meningkatkan kualitas uang Rupiah, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna menjamin ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Bank Indonesia terus mengakselerasi pendalaman PUVA yang modern dan maju serta terintegrasi dengan strategi Operasi Moneter (OM) *pro-market* untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pembiayaan ekonomi nasional. Sejak implementasi *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang 2030 (BPPU 2030), transaksi PUVA Indonesia terus melanjutkan perkembangan positif, antara lain tecermin dari meningkatnya rerata harian nilai transaksi *repurchase agreement* (repo), *Overnight Index Swap* (OIS), dan DNDF. Dari sisi mekanisme pembentukan harga (*pricing*), berbagai inisiatif diarahkan untuk membentuk struktur suku bunga pasar uang (*term-structure*) yang efisien dari tenor dua minggu hingga 12 bulan. Bank Indonesia juga senantiasa mendorong pengembangan pelaku PUVA agar semakin aktif, kompeten, berintegritas, dan profesional sekaligus memperkuat peran asosiasi, termasuk melalui akselerasi implementasi Dealer Utama (*Primary Dealer*) PUVA. Dari sisi infrastruktur, penguatan dan pengembangan dilakukan secara menyeluruh mencakup tiga sisi, yaitu *front-end*, *middle-end*, dan *back-end* guna memastikan kelancaran transaksi, efisiensi proses, dan penguatan manajemen risiko. Selain itu, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan otoritas sektor keuangan lainnya (Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan) baik dalam pengembangan

pasar keuangan melalui edukasi dan literasi keuangan maupun dalam memperluas sumber pembiayaan ekonomi.

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendorong akselerasi Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan (IEKB) guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang tangguh dan berkelanjutan. Implementasi IEKB ditempuh melalui (i) pengembangan ekosistem ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang terintegrasi dan berdaya saing, (ii) pembiayaan inklusif dan berkelanjutan yang optimal, dan (iii) perluasan literasi dan sinergi ekonomi-keuangan inklusif dan berkelanjutan. Di samping itu, Bank Indonesia juga terus mendorong pengembangan ekonomi-keuangan syariah nasional yang mandiri dan inklusif. Pengembangan tersebut ditempuh melalui penguatan 3 (tiga) pilar strategi, yaitu (i) pengembangan ekosistem Rantai Nilai Halal yang terintegrasi dan berdaya saing, (ii) optimalisasi pembiayaan syariah, serta (iii) penguatan literasi dan inklusi ekonomi-keuangan syariah. Di tingkat global, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan internasional untuk mendukung ketahanan dan stabilitas makroekonomi serta pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan transaksi internasional dalam mata uang lokal melalui penguatan kerja sama dan mendorong implementasinya serta aktif meningkatkan kerja sama bilateral kebanksentralan. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga dalam mengelola persepsi positif perekonomian Indonesia serta mendorong promosi investasi dan perdagangan. Reputasi Bank Indonesia di tingkat internasional semakin kuat, tecermin dari peran aktif dalam berbagai forum kerja sama internasional. Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia memperoleh beberapa penghargaan internasional antara lain dari Central Banking Award, the Asian Banker, Global Islamic Economy and Finance Award (GIFA) 2025, Contact Center World Global Asia Pacific Top Ranking Performers Award 2025, dan Asia Pacific Stevie Award 2025.



Di bidang kelembagaan, Bank Indonesia terus melakukan transformasi kebijakan, transformasi organisasi, digitalisasi, dan sumber daya manusia guna memperkuat kerangka kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia dalam merespons lingkungan strategis yang berkembang. Pada area kebijakan, Bank Indonesia melanjutkan penguatan pengaturan Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI) yang mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, dengan ditopang oleh kebijakan pendukung untuk mencapai tujuan yang diamanatkan UU. Transformasi kelembagaan difokuskan pada tiga agenda pokok. *Pertama*, penguatan sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan bank sentral berdasarkan prinsip independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi (IKKAT). *Kedua*, digitalisasi proses kerja kebijakan dan kelembagaan menuju visi sebagai bank sentral digital terdepan. *Ketiga*, penguatan kepemimpinan Bank Indonesia yang profesional dengan kompetensi tinggi (*book-smart*), pengalaman kuat (*street-smart*), dan berakhlak mulia (*spiritual smart*) melalui program budaya kerja “Aku Bangga BI Bermakna” (AB3).

Bauran Kebijakan Transformasi Ekonomi Nasional: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan

Ke depan, penguatan sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional perlu di lima area guna mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan. *Pertama*, stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan perlu tetap menjadi prioritas utama. Indonesia diakui internasional dalam kemampuan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ke depan, stabilitas ini semakin penting untuk dapat mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan agregat, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi dinamika perekonomian dan keuangan global yang terus berubah cepat dan penuh ketidakpastian. Dalam konteks tersebut, stabilitas nilai tukar Rupiah dan inflasi yang rendah dan terkendali perlu terus dijaga. Disiplin fiskal perlu dipertahankan dengan defisit fiskal yang tidak melebihi 3% PDB. Selain itu, ketahanan dan stabilitas

sistem perbankan juga perlu terus diperkuat. Oleh karena itu, koordinasi kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia serta sinergi kebijakan dalam KSSK perlu terus dipererat.

***Kedua*, transformasi sektor riil perlu dipercepat untuk meningkatkan sumber-sumber pertumbuhan dalam negeri yang lebih tinggi.**

Akselerasi transformasi juga sekaligus untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi sebagai pilar penting ketangguhan dan kemandirian ekonomi nasional. Kebijakan industri melalui hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA) perlu menjadi prioritas pengembangan industri strategis nasional, termasuk sektor mineral, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Pengembangan model bisnis yang menguntungkan secara komersial sangat penting agar menarik bagi penanaman modal, baik oleh Pemerintah melalui Danantara maupun swasta, baik dari dalam dan luar negeri. Untuk itu, kebijakan reformasi struktural untuk perbaikan iklim investasi, infrastruktur konektivitas, dan riset perlu terus dikembangkan untuk peningkatan daya saing dan produktivitas, baik modal, tenaga kerja, maupun inovasi dan efisiensi.

Ketiga, sumber-sumber pembiayaan perlu terus dikembangkan untuk mendukung program transformasi sektor riil, khususnya hilirisasi dan industrialisasi SDA. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan modal dan investasi yang besar, sehingga tidak sepenuhnya dapat dibiayai melalui APBN. Pembiayaan proyek hilirisasi dan industrialisasi SDA dapat dibiayai dari Danantara, perbankan dan lembaga keuangan lainnya, serta swasta dari dalam dan luar negeri. Jenis pembiayaan dapat berbentuk penanaman modal, kredit, serta penerbitan obligasi dan surat-surat berharga lainnya. Oleh karena itu, pendalaman pasar keuangan sangatlah penting untuk mendukung pembiayaan perekonomian nasional, baik untuk peningkatan likuiditas, suku bunga yang kompetitif, maupun instrumen lindung nilai atas suku bunga dan nilai tukar. Bank Indonesia berkoordinasi erat melalui KSSK untuk pendalaman pasar keuangan dimaksud.



Keempat, digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional perlu terus diakselerasi untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi dan berdaya tahan. Indonesia menjadi salah satu negara yang cepat dalam melakukan digitalisasi, khususnya digitalisasi sistem pembayaran serta transaksi ekonomi-keuangan digital secara ritel. Pemanfaatan QRIS, *Mobile Banking*, *E-Commerce*, dan BI-FAST semakin meluas di masyarakat dan UMKM karena memberikan kemudahan, kecepatan, dan biaya transaksi yang sangat murah sehingga memperluas ekonomi dan keuangan yang inklusif. Digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah juga terus berkembang untuk meningkatkan penerimaan dan efisiensi pengeluaran anggaran di tingkat pusat dan daerah. Ke depan, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan ekonomi keuangan nasional perlu terus diperkuat dan pengembangan usaha jasa berbasis digital di berbagai segmen ekonomi perlu terus diperluas. Pengembangan digitalisasi sistem pembayaran ritel dan nilai besar (*wholesale*) terus dilakukan, termasuk pengembangan Rupiah Digital dan Aset Keuangan Digital oleh Bank Indonesia sesuai kewenangan UU. Kerja sama antarnegara untuk sistem pembayaran digital perlu diperluas, termasuk konektivitas QRIS, BI-FAST, dan penggunaan mata uang lokal (*Local Currency Transactions*, LCT) dalam penyelesaian transaksi perdagangan, investasi, dan keuangan.

Kelima, efektivitas kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara mitra utama perlu terus ditingkatkan. Kerja sama perdagangan dan investasi Indonesia perlu difokuskan pada negara-negara mitra utama yang paling menguntungkan secara bilateral dan regional, termasuk ASEAN+3 (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan), India, Timur Tengah, dan Uni Eropa, dengan tetap menyuarkan kerja sama multilateral. Kerja sama tersebut perlu dikaitkan dengan kepentingan Indonesia untuk perdagangan dan investasi yang mendukung program-program hilirisasi SDA dan kebutuhan pembiayaannya. Kerja sama juga mencakup perluasan LCT, pendalaman pasar keuangan,

serta kerja sama sistem pembayaran digital antarnegara dalam memfasilitasi kerja sama perdagangan dan investasi secara bilateral dan regional tersebut.

Arah Bauran Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2026: Mendorong Pertumbuhan, Menjaga Stabilitas

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2026 akan terus diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas. Arah bauran kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa siklus ekonomi dan siklus keuangan Indonesia masih di bawah potensial dan sedang meningkat menuju optimal pada sekitar tahun 2027-2028. Dalam siklus ekonomi, hal ini tecermin pada prakiraan inflasi yang akan tetap terkendali pada sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada tahun 2026 dan 2027 mendatang, serta pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah kapasitas *output* nasional dalam kisaran 4,9-5,7% dan 5,1-5,9% pada periode yang sama. Sementara dalam siklus keuangan, pertumbuhan kredit diperkirakan masih di bawah tingkat optimal, yaitu 8-12% pada 2026 dan 9-13% pada 2027. Ke depan, sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan Pemerintah dan KSSK akan terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan menuju Indonesia Emas.

Kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2026 akan diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah dengan tetap memanfaatkan ruang penurunan suku bunga BI-Rate untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Arah kebijakan moneter tahun 2026 akan ditempuh dengan empat instrumen pokok. *Pertama*, kebijakan suku bunga secara *forward-looking* dan *pre-emptive* untuk mencapai sasaran inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. *Kedua*, ekspansi likuiditas moneter dengan strategi operasi moneter "*pro-market*" untuk memperkuat efektivitas transmisi penurunan



suku bunga BI-Rate ke suku bunga perbankan serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas. *Ketiga*, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas eksternal dari dampak rambatan ketidakpastian global. *Keempat*, menjaga kecukupan cadangan devisa untuk mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, didukung dengan pengelolaan lalu lintas devisa sesuai kaidah internasional. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi moneter dengan kebijakan fiskal Pemerintah untuk pencapaian sasaran inflasi, stabilitas makroekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan.

Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan makroprudensial yang longgar pada tahun 2026 untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Arah kebijakan makroprudensial pada 2026 akan tetap longgar dan ditempuh melalui tiga langkah berikut. *Pertama*, penguatan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial *forward looking lending channel* dalam mendorong perbankan untuk meningkatkan kredit/pembiayaan ke sektor-sektor prioritas. *Kedua*, percepatan penurunan suku bunga deposito dan kredit perbankan melalui efektivitas KLM *forward looking interest channel* dan respons yang diperlukan, termasuk koordinasi KSSK dalam penurunan suku bunga deposan besar (*special rate*) dan penurunan margin suku bunga kredit. *Ketiga*, penguatan surveilans sistemik untuk menjaga ketahanan perbankan dari dampak gejolak global dan risiko operasional, termasuk dengan penguatan Protokol Manajemen Krisis Terintegrasi (PMKT). Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan KSSK juga terus diperkuat untuk peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor prioritas, penguatan ketahanan SSK, serta keberlanjutan reformasi sektor keuangan sebagai tindak lanjut dari amanat UU P2SK.

Bank Indonesia akan terus mengakselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD) untuk generasi mendatang dengan mengacu pada *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030*. Arah kebijakan sistem pembayaran pada 2026 difokuskan untuk mempercepat kemajuan digitalisasi guna lebih mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui lima langkah pokok. *Pertama*, dari sisi infrastruktur sistem pembayaran, Bank Indonesia akan melakukan pengembangan New BI-FAST dan *fast payment* industri, modernisasi BI-RTGS, dan infrastruktur data pembayaran yang saling 3i (interkoneksi, integrasi, dan interoperabilitas) untuk perumusan kebijakan, pengembangan bisnis industri, dan kepentingan publik. *Kedua*, dari sisi konsolidasi Industri, Bank Indonesia akan memperkuat digitalisasi sistem pembayaran pada perbankan dan mendorong *interlink* antara bank dan *fintech*, serta reformasi regulasi untuk konsolidasi industri sistem pembayaran dan penataan Industri Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) agar integritas pembayaran lebih kuat. *Ketiga*, dari sisi Inovasi dan akseptasi digital, Bank Indonesia berkolaborasi dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk inovasi dan akseptasi pembayaran digital secara seimbang dengan perlindungan konsumen melalui Pusat Inovasi Digital Indonesia/PIDI, kampanye, dan edukasi-literasi masyarakat. *Keempat*, dari sisi internasionalisasi pembayaran, Bank Indonesia akan memperluas kerja sama internasional sistem pembayaran ritel baik secara bilateral maupun multilateral dalam pengembangan NEXUS. *Kelima*, dari sisi pengembangan Rupiah Digital, Bank Indonesia akan melanjutkan tahap eksperimentasi lanjutan dengan fokus pada pengembangan *Securities Ledger*.

Pendalaman pasar uang dan pasar valas terus berperan penting dalam mendukung efektivitas transmisi kebijakan Bank Indonesia, stabilitas sistem keuangan, dan pembiayaan fiskal dan perekonomian. Kebijakan pendalaman PUVA pada 2026 akan difokuskan pada lima program



utama. *Pertama*, pengembangan produk repo sejalan dengan upaya peningkatan volume dan likuiditas pasar sekunder Sekuritas Rupiah Bank Indonesia/SRBI, Sukuk Bank Indonesia (SUKBI), dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) serta Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), sekaligus mendukung pembentukan pasar *Overnight Index Swap* (OIS) dan *Foreign Exchange Swap* (FX Swap). Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas transmisi moneter, stabilitas Rupiah, *hedging*, serta manajemen likuiditas jangka pendek. *Kedua*, penguatan mekanisme pasar yang efisien dalam pembentukan struktur suku bunga (INDONIA, OIS, dan Repo), nilai tukar (DNDF), dan instrumen *hedging* (IRS dan FX Swap). *Ketiga*, penguatan konsolidasi pelaku pasar melalui penguatan Dealer Utama PUVA dan penguatan peran Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (APUVINDO) dalam implementasi strategi operasi moneter dan pengembangan PUVA, termasuk dalam peningkatan kualitas pelaku PUVA dan penerapan kode etik pasar. *Keempat*, pengembangan infrastruktur pasar uang, operasi moneter, dan sistem pembayaran yang saling 3i melalui implementasi infrastruktur data sistem pembayaran PUVA, sekaligus sebagai fondasi untuk mendukung penerbitan Digital Rupiah. *Kelima*, sinergi dan koordinasi dalam pembiayaan ekonomi untuk mendukung terciptanya PUVA yang bertata kelola.

Bank Indonesia terus memperluas serta memperkuat perannya dalam mendorong percepatan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan (IEKB) guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Penguatan IEKB difokuskan pada pengembangan ekosistem ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang terintegrasi dan berdaya saing. Selain itu, Bank Indonesia juga menitikberatkan pada optimalisasi pembiayaan, literasi, dan sinergi di bidang ekonomi dan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. *Pertama*, untuk meningkatkan daya saing, Bank Indonesia akan terus memperkuat model bisnis, pedoman, dan berbagai bentuk fasilitasi, termasuk

pelaksanaan proyek percontohan (*pilot project*) yang mencakup peningkatan kapasitas dan perluasan pasar, termasuk *supply chain*. *Kedua*, untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, *business matching* pembiayaan akan terus diperkuat melalui sinergi dengan berbagai kementerian/lembaga, lembaga keuangan, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di dalam negeri. *Ketiga*, literasi dan sinergi juga terus diperluas melalui penerapan Kompetensi Inti Literasi dan Inklusi Keuangan (KLIK), modul edukasi terstandarisasi, serta program edukasi dan pendampingan berkelanjutan di berbagai daerah. Bank Indonesia juga terus memperkuat perannya dalam mengakselerasi pengembangan ekosistem ekonomi-keuangan syariah (eksyar) secara menyeluruh. Fokus pengembangan ekosistem *Halal Value Chain* (HVC) akan tetap diutamakan pada sektor unggulan, yaitu makanan halal (*halal food*), fesyen (*modest fashion*), dan pariwisata ramah muslim. Dari sisi keuangan syariah komersial, kebijakan pendalaman pasar uang syariah guna mendukung pembiayaan syariah dilakukan melalui pengembangan model bisnis pembiayaan yang mendukung sektor unggulan eksyar, pelaksanaan Bulan Pembiayaan Syariah (BPS), penguatan kebijakan makroprudensial yang mendukung sektor unggulan eksyar, dan kebijakan terkait *primary dealer* (PD) syariah. Selanjutnya, perluasan literasi dan inklusi eksyar akan terus dilakukan bersinergi dengan para pemangku kepentingan.

Bank Indonesia senantiasa bersinergi dan berkoordinasi erat dengan Pemerintah untuk semakin memperkuat posisi Indonesia baik secara bilateral, di kawasan regional Asia, maupun global. Kebijakan internasional ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam memperkuat ketahanan ekonomi dari dampak global dengan menjalin kerja sama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada tahun 2026, kebijakan internasional Bank Indonesia akan dilakukan melalui tiga fokus utama. *Pertama*, penguatan dan perluasan kerja sama bilateral dengan bank sentral negara mitra utama Indonesia di bidang



kebanksentralan, sistem pembayaran, LCT, dan kerja sama keuangan internasional seperti swap bilateral (*Bilateral Swap Arrangement/BSA*). Kedua, penguatan kerja sama regional terutama *ASEAN Financial Integration*, *ASEAN Payments Connectivity (APC)*, dan penguatan *Chiang-Mai Initiative Multilateralism (CMIM)* yang merupakan kerja sama keuangan regional ASEAN+3. Ketiga, partisipasi aktif dalam memperjuangkan kepentingan nasional dalam agenda-agenda ekonomi, moneter, dan keuangan internasional. Selain itu, pengelolaan persepsi positif kepada investor dan lembaga *rating* maupun promosi perdagangan dan investasi terus ditingkatkan melalui Investor Relation Unit (IRU) Bank Indonesia, baik IRU (nasional), RIRU (daerah), dan GIRU (global), dengan memperkuat peran kantor-kantor Bank Indonesia di berbagai daerah dan luar negeri. Bank Indonesia juga terus memperkuat kepemimpinan institusional dengan menjadi *Chair* dalam forum kerja sama internasional, serta meraih penghargaan internasional di bidang bauran kebijakan, penelitian, inovasi, kelembagaan, kepemimpinan, serta digitalisasi sistem pembayaran dan pengedaran uang.

Bank Indonesia akan terus mengimplementasikan program transformasi kelembagaan dengan senantiasa mengutamakan prinsip tata kelola yang baik dan profesional. Transformasi kelembagaan akan terus diperkuat dan dipertajam, terutama dalam rangka mengimplementasikan mandat UU Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui UU P2SK. Ke depan, transformasi kelembagaan akan terus berfokus pada tiga area utama. *Pertama*, penguatan fungsi organisasi dan proses kerja yang terintegrasi, selaras, dan lengkap. *Kedua*, penguatan digitalisasi proses kerja kebijakan dan kelembagaan melalui penyempurnaan *business process re-engineering* berbasis digital yang mengutamakan *collaborative work* dan didukung pemanfaatan *Artificial Intelligence*. *Ketiga*, penguatan sumber daya manusia melalui penguatan kepemimpinan, pengembangan kapabilitas baru, dan penguatan *Employee Value Proposition (EVP)*. Lebih lanjut, Bank Indonesia akan senantiasa memperkuat tata kelola kebijakan dan kelembagaan untuk membangun lembaga bank sentral yang kredibel, profesional, bertata kelola kuat, dan transparan.